

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hidup di zaman yang serba cepat dan canggih pada masa ini memerlukan pikiran dan ide yang maju dan memiliki daya inovasi tinggi agar dapat bersaing dan berkolaborasi agar tidak tertinggal jauh di belakang. Salah satunya di dalam bidang pendidikan yang mana merupakan fondasi bagi sebuah negara untuk membuat SDM berkualitas supaya negara bisa terus maju, berkembang dan berinovasi. Ketertinggalan dalam pendidikan akan membawa negara pada kehancuran. Seperti yang dikatakan oleh Eko Risdianto (Yamin & Syahrir, 2020) bahwa sistem pendidikan dapat membuat murid yang mempunyai keahlian untuk berpikir logis, menyelesaikan masalah, dan memiliki kreativitas serta inovasi, serta kapabilitas untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan efektif dan harmonis yang disampaikan pada penelitian Dedi Asmajaya (2020) bahwa pendidikan ialah alat yang paling sesuai dan efisien guna menyiapkan tenaga kerja berkualitas di era digital. Ini merupakan platform eksklusif yang dipandang dan diharapkan dapat berperan sebagai instrumen dalam membina tenaga kerja yang superior. Selain itu, keahlian guna mencari, mengatur, dan menyampaikan informasi, serta keterampilan dalam menggunakan informasi dan teknologi, sangat penting. Untuk memenuhi standar kualitas tersebut, diperlukan kebijakan pendidikan yang dapat menjamin mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Tujuan pendidikan di Indonesia adalah untuk membentuk generasi Indonesia yang berprestasi, independen, dan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Mereka adalah individu-individu yang memiliki kemampuan berpikir analitis, inovatif, otonom, beriman, berperilaku terpuji, dan mampu berkolaborasi, menghormati keragaman di tingkat global. (kemendikbud, 2020) Dalam upaya mencapai visi ini, Nadiem Makarim mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 terkait Kebijakan Merdeka Belajar atau Kebebasan Belajar, yang membawa konsep memberikan kebebasan kepada instansi pendidikan untuk merangsang dan memajukan pemikiran inovatif di antara peserta didik (Sibagariang, 2021).

Dengan diterapkannya konsep Merdeka Belajar, semoga bisa berdampak positif pada pendidikan di Indonesia. Kebebasan dan kreativitas yang diberikan kepada lembaga pendidikan akan membawa inovasi baru dalam metode pengajaran dan pembelajaran. Para guru dapat mengembangkan pendekatan yang lebih menarik dan efektif, sementara siswa dapat ikut serta langsung. Orang tua juga akan merasa lebih terlibat dan senang melihat perkembangan positif anak-anak mereka (Bayumie, 2020). Sebagai upaya untuk mengatasi dan menjawab keperluan dunia pendidikan, pada bulan Maret tahun 2020 lalu sudah terdapat 4 (empat) kebijakan baru yang diluncurkan Mendikbud yang disebut dengan Merdeka Belajar episode 1 (satu) hingga episode 4 (empat). Kebijakan ini dinamakan program organisasi penggerak yang memiliki 4 (empat) pokok kebijakan, yaitu :

1. Kepala sekolah menyadari cara belajar murid dan bisa meningkatkan keterampilan pengajaran pengajar.
2. Guru mendukung siswa dan mengedukasi sejalan dengan fase progres mereka.

3. Peserta didik merasa senang dalam belajar, memiliki etika yang terpuji, berpikir analitis, inovatif, dan bisa berkolaborasi (gotong royong).
4. Pembentukan kelompok Pelopor yang melibatkan wali murid, pemimpin masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan, yang diinginkan agar membantu sekolah dalam menaikkan standar pembelajaran murid (Kemendikbud, 2020).

Salah satu program yang termasuk kebijakan merdeka belajar ialah sekolah penggerak. konsep sekolah penggerak ialah strategi yang bertujuan menambah pencapaian belajar murid menyeluruh dengan membentuk karakteristik pelajar pancasila yang mencakup aspek karakter dan keahlian. Program ini mengutamakan peran kepala Sekolah dan guru yang merupakan SDM unggul dalam mencapai tujuan tersebut (Kemendikbud, 2020). Di dalam hal ini, terutama guru yang menjadi jembatan antara kepala sekolah dan siswa harus diperhatikan kualitas masing-masing guru. Seperti yang disampaikan pada pasal 8 UU RI No. 14:2005 (dalam Wahyo, 2018) bahwa "Seorang guru harus mempunyai sertifikat kependidikan, kualifikasi akademik, keahlian, kesehatan fisik dan mental, serta kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional".

Berdasarkan harapan serta rencana inovasi kurikulum merdeka belajar, diharapkan secara keseluruhan di setiap daerah dapat menerapkan kurikulum ini baik sejalan dengan peraturan, " Sejalan dengan putusan Menteri Pendidikan nomor 1177/M/2020 mengenai Program Sekolah Penggerak. Dalam pernyataan pertama, diartikan kegiatan yang berpusat pada pengembangan keterampilan murid pendekatan holistik untuk mendorong pencapaian karakteristik siswa Pancasila. Pernyataan kedua, menegaskan bahwa Program Sekolah Penggerak seperti yang disebutkan dalam

Pernyataan Pertama diadakan pada: a) Pendidikan Pra-Sekolah (PAUD) untuk anak berusia 5 hingga 6 tahun; b) Sekolah Primer (SD); c) SMP; d) SMA, dan e) Sekolah Khusus (SLB). Pernyataan ketiga, menegaskan program Sekolah Penggerak yang diimplementasikan dengan; a) Diseminasi informasi mengenai kegiatan, b) Menetapkan provinsi/kabupaten/kota selaku pengorganisir kegiatan Sekolah Penggerak., c) Menunjuk unit pendidikan selaku penyelenggara kegiatan Sekolah Penggerak, d) penyelenggara aktivitas Sekolah Penggerak oleh pemerintah, e) penyelenggara aktivitas oleh unit pendidikan, dan f) Evaluasi terhadap implementasi kegiatan .

Berkaitan dengan program Sekolah Penggerak tersebut, berdasarkan SK Kemendikbudristek Nomor : 0301/C/HK.00/2022 14 Januari 2022 Terkait tetapan Unit Pendidikan yang Menjalankan Kegiatan Sekolah Penggerak Generasi Kedua adapun Sekolah sudah dibuat dan dinyatakan lulus menjadi Sekolah Penggerak khususnya di Serdang Bedagai tercatat ada 7 (tujuh) Sekolah TK, 23 SD, 4(empat) SMP, dan 4(empat) SMA. Penelitian ini difokuskan pada satu jenjang pendidikan yaitu pada jenjang Sekolah Menengah Atas yang tersusun dari empat Sekolah yakni: 1) SMA Swasta Dharma Utama Pegajahan, 2) SMA Swasta Setia Budi Abadi Perbaungan, 3) SMA Swasta Teladan Sei Rampah, dan 4) SMA Negeri 1 Kotarih yang telah ditetapkan sebagai Sekolah Penggerak tingkat SMA di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

Diharapkan bahwa Kurikulum Merdeka Belajar bisa merespon pertumbuhan pesat globalisasi di era ke-21. Oleh karena itu, tuntutan perubahan zaman mendorong institusi pendidikan agar selalu dinamis dan menemukan solusi bagi kurikulum. Dalam konteks ini, ada banyak elemen yang berkontribusi terhadap pembaharuan, terdiri dari

modifikasi dalam kurikulum nasional. Hingga kini, tuntutan publik sering kali ambigu dan biasanya susah untuk diperkirakan.

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) telah diimplementasikan di Indonesia mulai dari tahap pendidikan awal, dari SD hingga Kuliah. Ini mengindikasikan PJOK ialah elemen krusial dalam kurikulum dikarenakan mampu memperkuat memori dan menyediakan kejadian yang berkesa melewati kegiatan fisik. Oleh karena itu, diharapkan bahwa edukasi PJOK dapat jadi benteng optimal teruntuk siswa SMA agar mencegah perilaku menyimpang. Hal ini diperkuat dengan terobosan terbaru dari Kemendikbud tentang Kurikulum Merdeka Belajar. Jika tahapan edukasi PJOK dan kurikulum terbaru ini dilaksanakan ketat, diharapkan dapat menurunkan level kerusuhan pemuda dengan signifikan.

PJOK adalah subjek yang kompleks yang melibatkan tiga elemen utama, yaitu perilaku, ilmu, dan kemahiran. Meskipun demikian, mengintegrasikan PJOK dengan Kurikulum Merdeka Belajar bukanlah tugas yang mudah. Lebih jauh lagi, tidak semua sekolah mampu menerapkan kurikulum baru ini dengan baik dan sesuai dengan peraturan. Dari sudut pandang persiapan, masih ada banyak sekolah, terutama di daerah terpencil di Indonesia, yang belum siap.

Sama halnya juga dengan Sekolah Penggerak tingkat SMA se-Kabupaten Serdang Bedagai. Masalah utamanya terletak pada variasi pemahaman guru tentang bagaimana mengintegrasikan Kurikulum Merdeka Belajar pada kompetensi PJOK. Pada SMA teladan sei rampah, SMA Setia Budi Abadi Perbaungan, SMA Dharma Utama Pegajahan, dan SMA Negeri 1 Kotarih, Sekolah Penggerak tingkat SMA di Serdang Bedagai.

Berdasarkan observasi awal riset ini diambil yakni pada saat *Program Management Office* (PMO), yang dilaksanakan pada setiap bulannya yang dilakukan oleh masing-masing kepala Sekolah dan perwakilan 2 guru komite Sekolah Penggerak, Guru PJOK di sekolah tersebut berusaha menerapkan pembelajaran dengan kurikulum tersebut, meskipun realitas di lapangan menunjukkan situasi yang berbeda.

Masalah lainnya ialah kepehaman tentang ATP, MA, Modul Proyek, hingga evaluasi perkembangan siswa merupakan tantangan yang harus ditangani oleh pengajar PJOK. Ini mengindikasikan pengajar memegang peranan krusial dalam meraih sasaran pendidikan nasional pada konteks pengajaran dan edukasi, maka diperlukan adanya penekanan pada pengembangan kapabilitas pengajar selaku pekerjaan yang beretika, taat pada regulasi, menjunjung tinggi profesionalitas dan memiliki keahlian. Entitas lainnya tidak kala berperan penting dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka Belajar ialah lembaga pendidikan, atau spesifiknya Kepala Sekolah dan timnya.

Berdasarkan observasi awal evaluasi pembelajaran pada Sekolah Penggerak yang menggunakan kurikulum Merdeka belajar, sudah berjalan selama 2 tahun yaitu pada kelas X dan kelas XI dan evaluasi dilakukan hanya di pantau dan difasilitori oleh fasilitator yang bertugas untuk memberikan masukan kepada kepala Sekolah Penggerak, yang kemudian nantinya Sekolah menerapkannya, tidak ada spesifik dalam hal Mata Pelajaran tertentu, salah satunya Mata Pelajaran PJOK yang selama ini hanya di evaluasi oleh kepala Sekolah itu sendiri. Ini tentunya akan menjadi masalah yang akan dihadapi karena belum ada guru penggerak khusus di mata pelajaran PJOK di Sekolah Penggerak tersebut.

Berdasarkan keterangan dari ketua MGMP PJOK SMA Kabupaten Serdang bedagai yaitu bapak Rikardo Situmorang, S.Pd sampai saat ini belum ada Guru PJOK SMA kabupaten Serdang Bedagai yang lulus menjadi guru penggerak, tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana tujuan pembelajaran PJOK itu bisa tercapai, dengan kurikulum yang baru ini, yaitu kurikulum merdeka belajar.

Edukasi PJOK wajib disesuaikan pada kapabilitas pribadi tiap individu dan perlu dijalankan secara terstruktur, sejalan pada sifat-sifat individu, dan diatur lewat peningkatan fisik yang optimal untuk mencapai peningkatan individu secara menyeluruh. Maka dari itu, menilai seberapa jauh sasaran pembelajaran telah tercapai, tahapan evaluasi diperlukan. Evaluasi berkaitan erat pada tahapan pembelajaran. Evaluasi digunakan sebagai metode memantau kemajuan dalam pembelajaran dan menentukan seberapa jauh sasaran pembelajaran yang ditentukan telah dicapai. Pemilihan metode evaluasi tergantung kepada kapabilitas evaluator, objektif evaluasi, dan individu yang menjadi target evaluasi. Sistem evaluasi diimplementasikan wajib lebih mengutamakan tahapan peningkatan dibandingkan hanya bertanggung jawab terhadap hasil akhir.

Model evaluasi merupakan desain evaluasi dirancang dari ahli evaluasi, yang umumnya diberi nama berdasarkan penemu atau tahapan evaluasinya (Arifin, 2010). Sesuai dengan pandangan Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009), terdapat berbagai model yang dipakai dalam evaluasi kegiatan. Meski model-model evaluasi tersebut mempunyai perbedaan, tujuannya tetap serupa. Arikunto (2009) membagi model evaluasi jadi 8 jenis:

1. *Goal oriented evaluation model*

Evaluasi dijalankan konstan dan berkelanjutan melalui sasaran agar memahami seberapa jauh kegiatan telah berhasil.

2. *Goal-free evaluation model* dikembangkan oleh Scriven.

Evaluasi berikut bukan mengutamakan sasaran program, melainkan tambahan kepada penilaian efek kegiatan, baik yang diantisipasi serta yang tidak diantisipasi tetapi muncul.

3. *Formatif Summatif Evaluation Model*, oleh Michael Scriven.

Evaluasi formatif adalah jenis evaluasi yang dilakukan selama kegiatan sedang berlangsung. Sasaran bagi evaluasi ialah bertujuan menghimpun informasi yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan pada program. Di sisi lain, evaluasi sumatif dilaksanakan sesudah kegiatan berakhir. Sasarannya ialah agar menentukan sejauh mana kegiatan tersebut bermanfaat, dan apakah program tersebut harus dilanjutkan atau tidak. Jika diputuskan untuk melanjutkan, fakta maupun angka diperlukan sebagai peningkatan kegiatan. Namun, jika program tersebut dihentikan, jadi bisa diubah dengan kegiatan lain yang lebih kompetitif.

4. *Countenance Evaluation Model*, oleh Stake.

Model yang dirancang dari Stake ini menyoroti 2 elemen, yaitu penjelasan dan penilaian. Deskripsi Matriks menunjukkan intensitas (Sasaran) dan pengamatan (Dampak) maupun apa yang benar-benar berlangsung. Pengkajian memiliki dua sisi, yaitu kriteria dan pengkajian.

5. *Responsive Evaluation Model*, oleh Stake.

Pada Model Responsif, metode yang diterapkan menitikberatkan kepada tahapan. Model ini didasarkan kepada kejadian bahwasannya pada dasarnya individu kurang

menyenangi evaluasi. Oleh karena itu, model ini secara langsung mengawasi semua aktivitas kegiatan dan selanjutnya mengilustrasikan apakah benar-benar berlangsung di sana.

6. *CIPP Evaluation Model*, oleh Stufflebeam

Model evaluasi CIPP bisa dipakai di beragam bidang atau organisasi. Model CIPP ini dibuat oleh Stufflebeam bersama koleganya (1967) di Universitas Negeri Ohio. CIPP ialah singkatan istilah, yaitu: Konteks, Input, Proses, dan Produk.

7. *CSE-UCLA Evaluation Model*, menekankan pada “Kapan” evaluasi dilakukan.

Model ini dibuat oleh Alkin pada 1969. Dia mengembangkan struktur evaluasi yang sangat serupa dengan model CIPP. Alkin mengartikan evaluasi ialah tahapan yang ditujukan untuk memverifikasi putusan, melakukan pemilihan data yang relevan, menghimpun dan menganalisa data tersebut, dan kemudian menyampaikan ringkasan data yang dapat membantu pengambil keputusan dalam menentukan pilihan terbaik.

8. *Discrepancy Model*, oleh Provus

Istilah "discrepancy" dalam kata Indonesia diartikan sebagai "ketidaksesuaian". Model oleh Malcolm Provus ini fokus pada ketidaksesuaian implementasi program. Tujuan evaluasi yang dilaksanakan oleh evaluator ialah untuk menghitung seberapa besar ketidaksesuaian tersebut terjadi di setiap elemen. Secara khusus, model yang dirancang Malcolm Provus menyoroti adanya ketidaksesuaian, dasarnya merupakan syarat umum evaluasi, yakni melakukan pengukuran selisih antar yang ingin tercapai dengan apa yang sebenarnya telah dicapai.

Berdasarkan macam-macam model evaluasi dari pernyataan para ahli, maka riset

ini memakai model evaluasi CIPP ini dikarenakan menurut peneliti cocok untuk mengevaluasi pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka Belajar Sekolah Penggerak Tingkat SMA Se-Kabupaten Serdang Bedagai juga mempermudah peneliti mengelompokkan komponen yang dievaluasi secara komperhensif yang dibagi kedalam bentuk konteks, proses, masukan dan produk (*product*).

Berdasarkan informasi pada saat PMO (*Program Management Office*) Sekolah Penggerak Tingkat SMA di kabupaten Serdang bedagai dari Bapak Dedy Syaputra,.S.E.,M.Ak, Bapak Toni Hartono, S.Pd, Bapak Tarmin, S.Pd, Dan Ibu Antalilis Siregar, S.Pd yang merupakan Kepala Sekolah Sekolah Penggerak Tingkat SMA di Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan observasi awal belum pernah dilakukan evaluasi program belajar pada proses mengajar belajar Khususnya teruntuk mata pelajaran PJOK pada kurikulum merdeka belajar Sekolah Penggerak tingkat SMA di Serdang bedagai.

Salah satu cara untuk mencapai sasaran pembelajaran PJOK ialah dengan menilai sejauh mana kinerja berbagai unsur yang memperkuat kegiatan belajar mengajar Kurikulum Merdeka Belajar PJOK. Setelah evaluasi program pembelajaran Kurikulum Merdeka Belajar PJOK dilakukan, sekolah dan pengajar bisa menentukan unsur mana yang efektivitasnya wajib diperkuat.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti berkeinginan untuk melaksanakan riset mendalam pada judul “Evaluasi Pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka Belajar Sekolah Penggerak Tingkat SMA se-Kabupaten Serdang Bedagai”.

1.2. Identifikasi Masalah

Mengacu penjelasan konteks yang sudah disampaikan sebelumnya, kita bisa menentukan permasalahan berikut ini:

1. Sekolah Penggerak Tingkat SMA Se-Kabupaten Serdang Bedagai masih beradaptasi dengan pembelajaran kurikulum merdeka belajar yang relatif baru yang masih perlu dilaksanakan pelatihan-pelatihan untuk implementasi kurikulum Merdeka belajar khususnya pada guru PJOK.
2. Belum pernah diadakannya Evaluasi Kurikulum Merdeka Belajar Sekolah Penggerak Tingkat SMA Se-Kabupaten Serdang Bedagai khususnya pada mata pelajaran PJOK.
3. Belum diketahui bagaimana evaluasi pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka Belajar Sekolah Penggerak Tingkat SMA se-Kabupaten Serdang Bedagai memakai CIPP.

1.3. Fokus Masalah

Untuk mencegah permasalahan dalam penelitian ini menjadi terlalu luas, penting untuk menetapkan pembatasan, sampai cakupan penelitian menjadi lebih terfokus. Mempertimbangkan batasan biaya, sumber daya, kapabilitas, dan waktu riset yang tersedia, penulis akan berpusat pada diskusi mengenai evaluasi implementasi belajar mengajar berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan sebelumnya yaitu pada proses mengajar belajar PJOK Kurikulum Merdeka Sekolah Penggerak tingkat SMA se-Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan memakai model evaluasi CIPP *Context, Input, Process, dan Product*.

1.4. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah tersebut, rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana hasil evaluasi *context* pelaksanaan PJOK Kurikulum Merdeka Sekolah Penggerak tingkat SMA Se-Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Bagaimana hasil evaluasi *input* pelaksanaan PJOK Kurikulum Merdeka Sekolah Penggerak tingkat SMA Se-Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Bagaimana hasil evaluasi *process* pelaksanaan PJOK Kurikulum Merdeka Sekolah Penggerak tingkat SMA Se-Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Bagaimana hasil evaluasi *product* pelaksanaan PJOK Kurikulum Merdeka Sekolah Penggerak tingkat SMA Se-Kabupaten Serdang Bedagai.

1.5. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pembatasan dan definisi permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya, tujuan khusus yang ditargetkan dalam studi ini ialah:

1. Mengevaluasi *Context* belajar PJOK Kurikulum Merdeka Sekolah Penggerak tingkat SMA Se-Kabupaten Serdang Bedagai meliputi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar, Tujuan, dan Kebutuhan Terhadap penyelenggaraan Pembelajaran Kurikulum Merdeka Belajar.
2. Mengevaluasi *Input* belajar PJOK Kurikulum Merdeka Sekolah Penggerak tingkat SMA Se-Kabupaten Serdang Bedagai meliputi mengilustrasikan situasi pengajar, Keadaan Murid, Serta fasilitas dan infrastruktur.
3. Mengevaluasi *Process* belajar PJOK Kurikulum Merdeka Sekolah Penggerak tingkat SMA Se-Kabupaten Serdang Bedagai.

4. Mengevaluasi *Product* pelaksanaan belajar PJOK Kurikulum Merdeka Sekolah Penggerak tingkat SMA Se-Kabupaten Serdang Bedagai meliputi Hasil Pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka Belajar.

1.6. Manfaat Penelitian

Riset ini diperkirakan bisa memberi keuntungan, baik dari segi teori serta praktek, yaitu:

1. Secara Teoretis

- a. Riset ini bisa berfungsi agar memperluas ilmu dan pemahaman tentang evaluasi tahapan belajar mengajar PJOK Kurikulum Merdeka Sekolah Penggerak Tingkat SMA Se-Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. Riset ini bisa dijadikan referensi untuk riset kedepannya dalam mengevaluasi proses belajar PJOK Kurikulum Merdeka Sekolah Penggerak tingkat SMA Se-Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. Berkontribusi pada perkembangan pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa Program Pendidikan Olahraga Pascasarjana Universitas Negeri Medan.

2. Secara Praktis

- a. Untuk para peneliti, riset ini berfungsi sebagai fasilitas agar memperoleh pengalaman praktis melalui proses penelitian yang akan dijalankan. Dengan demikian, peneliti memiliki kesempatan untuk mendalami pemahaman mengenai pembelajaran PJOK dalam kurikulum merdeka belajar dan memberikan

sumbangsih pada perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di sektor Pendidikan. Riset ini juga mendukung proses penulisan tesis melewati evaluasi atas riset yang sudah dijalankan.

- b. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah khususnya Dinas PendidikanMKKS, MGMP PJOK berperan dalam merumuskan kebijakan agar menaikkan mutu belajar mengajar PJOK dalam Kurikulum Merdeka Belajar Sekolah Penggerak dengan cara mengidentifikasi dan memperbaiki setiap kelemahan yang ada.
- c. Untuk para guru, diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat merangsang kreativitas dalam menciptakan inovasi baru yang bertujuan untuk memperkaya pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka Belajar.
- d. Bagi Sekolah, Untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran PJOK dalam Kurikulum Merdeka Belajar, penting untuk mengidentifikasi dan memperbaiki setiap kekurangan yang ada.